

Kontribusi Indonesia Dalam Isu Kawasan Indo-Pasifik Melalui Kebijakan Global Maritime Fulcrum

Bagus Wahyu Hutomo¹ Marsetio² Rudiyanto³ Pujo Widodo⁴ Herlina Juni Risma Saragih⁵
Panji Suwarno⁶

Program Studi Keamanan Maritim, Fakultas Keamanan Nasional, Universitas Pertahanan
Republik Indonesia, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, Indonesia^{1,2,3,4,5,6}

Email: baguswahyu04@gmail.com¹

Abstrak

Indonesia memiliki posisi strategis sebagai negara kepulauan yang terletak di wilayah Indo-Pasifik. Untuk memanfaatkan potensi strategisnya, Indonesia mengeluarkan kebijakan *Global Maritime Fulcrum* yang bertujuan untuk memperkuat sektor maritim sebagai kunci penggerak ekonomi Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kontribusi Indonesia dalam menghadapi ancaman di kawasan Asia-Pasifik. Metode yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif dengan menggunakan data sekunder. Dalam konteks kawasan Indo-Pasifik, kebijakan *Global Maritime Fulcrum* memberikan kontribusi signifikan bagi stabilitas dan keamanan kawasan terutama dalam menjalankan kerjasama regional. Indonesia sebagai pemilik sebagian besar jalur pelayaran internasional di kawasan tersebut, berperan penting dalam menjaga keamanan dan ketertiban laut serta menjamin kelancaran perdagangan internasional. Kebijakan *Global Maritime Fulcrum* juga berdampak pada pengembangan sektor ekonomi dan industri maritim Indonesia. Melalui kebijakan ini, Indonesia berusaha memanfaatkan sumber daya laut yang melimpah di wilayahnya untuk membangun sektor industri maritim yang kuat dan berkelanjutan. Indonesia juga berupaya untuk meningkatkan daya saing produk-produk maritimnya di pasar global. Kontribusi Indonesia melalui kebijakan *Global Maritime Fulcrum* sangat penting dalam menjaga stabilitas dan keamanan kawasan Indo-Pasifik serta memperkuat sektor ekonomi dan industri maritim Indonesia.

Kata Kunci: Kontribusi, Asia-Pasifik, Global Maritime Fulcrum.

Abstract

Indonesia has a strategic position as an archipelagic country located in the Indo-Pacific region. To take advantage of its strategic potential, Indonesia issued a Global Maritime Fulcrum Policy, which aims to strengthen the maritime sector as a key driver of the Indonesian economy. This study aims to determine Indonesia's contribution to facing threats in the Asia-Pacific region using the qualitative method of descriptive analysis. In the context of the Indo-Pacific region, the GMF Policy makes a significant contribution to regional stability and security, especially in carrying out regional cooperation. Indonesia, as the owner of most of the international shipping lanes in the region, plays an important role in maintaining maritime security and order and ensuring the smooth running of international trade. GMF policy also has an impact on the development of Indonesia's maritime economic sector and industry. Indonesia seeks to utilize the abundant marine resources in its territory to build a strong and sustainable maritime industrial sector. Indonesia is also trying to increase the competitiveness of its maritime products on the global market. Indonesia's contribution through the GMF Policy is very important in maintaining the stability and security of the Indo-Pacific region and strengthening Indonesia's maritime economic and industrial sectors.

Keywords: Contribution, Asia-Pacific, Global Maritime Fulcrum.



Ciptaan disebarluaskan di bawah [Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

PENDAHULUAN

Kawasan Indo-Pasifik telah menjadi isu strategis dan geopolitik yang semakin menonjol dalam hubungan internasional saat ini. Indonesia sebagai negara maritim besar di kawasan ini,

memiliki peran penting dalam memainkan peran sebagai mediator dan penghubung antara negara-negara yang terlibat dalam kawasan Indo-Pasifik. Dalam upayanya untuk mengoptimalkan perannya dalam kawasan ini, Indonesia memperkenalkan kebijakan *Global Maritime Fulcrum* (GMF) pada tahun 2014. Kebijakan ini bertujuan untuk memanfaatkan potensi maritim Indonesia dan meningkatkan posisinya sebagai *Global Maritim Fulcrum*/Poros Maritim Dunia. Dalam konteks kawasan Indo-Pasifik, GMF memiliki kontribusi penting dalam mengatasi isu-isu keamanan, kerja sama ekonomi, dan tata kelola laut yang berkelanjutan. Indonesia berupaya untuk membangun hubungan yang saling menguntungkan dengan negara-negara tetangga dan mempromosikan stabilitas dan perdamaian di kawasan.

Secara geografis, Indo-Pasifik merupakan wilayah segitiga yang membentang di antara Samudra Hindia dan Pasifik, dengan India sebagai titik sentral yang berposisi strategis dalam hal geografi maritim. Beberapa kekuatan penting di wilayah ini meliputi Australia di tenggara, Jepang di utara, dan India di barat daya. Namun, secara geostrategis, Indo-Pasifik semakin menjadi kawasan yang saling terkait dalam hubungan keamanan dan ekonomi yang berkaitan dengan hubungan geopolitik antar negara-bangsa. Hal ini menandakan bahwa setiap perubahan yang signifikan di wilayah ini akan memengaruhi elemen lainnya di dalam kawasan. Dengan semakin saling ketergantungan tersebut, Indo-Pasifik semakin menjadi kawasan yang penting dan relevan dalam konteks politik dan ekonomi global saat ini.

Ada beberapa masalah pelik terjadi di kawasan Asia Pasifik yaitu di semenanjung Korea, serta konflik antara Jepang dan China karena manipulasi sejarah yang dituduhkan China kepada Jepang, sengketa Pulau Senkaku (Pulau Diaoyu dalam bahasa China). Kecelakaan kapal China dan pesawat adanya pengintai adalah contoh Isu-isu yang menjadi hot spot antar negara di kawasan Asia-Pasifik, khususnya berbagai ancaman di kawasan perbatasan maritim, yang dapat memicu perselisihan dan ketegangan yang berdampak pada dinamika kawasan. Saat ini persaingan antara Amerika Serikat beserta sekutunya melawan China disisi lain menyangkut pembangunan kekuatan militer China dalam rangka menguasai Laut China Selatan, dan pada bagian lain adalah pembangunan kekuatan laut India dalam rangka mengendalikan Samudera Hindia sesuai dengan aspirasi politiknya merupakan isu yang harus diperhatikan, Indonesia secara tidak langsung terlibat karena kedekatan wilayah konflik yang berbatasan langsung dengan negara Indonesia (Sartono, 2021).

Kawasan ini selalu rentan terhadap persaingan kekuatan besar yang berkaitan dengan kepentingan geostrategisnya dan pusat utama yang menghubungkan kawasan Pasifik dan Samudera Hindia. Narasi kepentingan geostrategis ini terbukti nyata ketika Joko Widodo dengan aktivisme kebijakan luar negerinya memperkenalkan "*Global Maritime Fulcrum*" atau GMF sebagai bagian dari strategi Indo-Pasifik Indonesia meneruskan visi "Wawasan Nusantara" (Aufiya, 2017). Wilayah Indo-Pasifik memiliki peran penting tidak hanya dari segi kontrol politik, tetapi juga sebagai tempat bagi negara-negara untuk menunjukkan kekuatan angkatan laut dan kedaulatannya. Kawasan ini juga memiliki potensi geoekonomi yang besar, menjadikannya penting dalam keamanan internasional, keamanan nontradisional, dan konektivitas ekonomi. Namun, persaingan di wilayah ini akan terus berlanjut kecuali keseimbangan kekuatan tercapai.

Tulisan ini menggunakan teori peran untuk mendeskripsikan kontribusi Indonesia pada kawasan Indo-Pasifik. 'Pandangan Indonesia terhadap Indo-Pasifik' berdampak signifikan pada cara Indonesia berinteraksi dengan aktor lain di kawasan ini. Dengan mengambil dari literatur tentang teori peran, khususnya tentang konsep peran dan lokasi, dan dengan meninjau dan menganalisis narasi kebijakan luar negeri utama seputar Indo-Pasifik, tulisan ini berpendapat bahwa Pandangan Indo-Pasifik adalah contoh lokasi peran dalam Indo-Pasifik baru. Telah terjadi pergeseran arah keluar yang signifikan dalam kebijakan luar negeri Indonesia, yang

bertepatan dengan konsepsi peran oleh Presiden Joko Widodo (atau 'Jokowi') tentang Indonesia sebagai kekuatan menengah (*middle power*). Melanjutkan agenda presiden sebelumnya yaitu Presiden Susilo Bambang Yudhono dengan menggunakan cara baru, pandangan Indo-Pasifik Indonesia dapat dipahami sebagai upaya untuk lebih menegaskan konsepsi peran Indonesia sebagai *middle power* dalam geopolitik kontemporer. Presiden Joko Widodo memutuskan untuk menggunakan kebijakan luar negeri sebagai instrumen untuk mencapai tujuan domestiknya.

METODE PENELITIAN

Tulisan ini menggunakan metode deskriptis kualitatif dengan menggunakan data sekunder dari berbagai sumber yang relevan. Creswell berpendapat bahwa metode kualitatif merupakan metode untuk memahami dan mengeksplorasi makna yang berasal dari masalah kemanusiaan atau masalah sosial yang terjadi. Dalam melakukan proses penelitian kualitatif, penulis mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan prosedur-prosedur, mengumpulkan data yang spesifik dari para partisipan hingga melakukan analisis data secara induktif dan terakhir dengan menerjemahkan kompleksitas suatu permasalahan. Data-data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain dokumen-dokumen kebijakan dan strategi pertahanan nasional, publikasi dari lembaga-lembaga pemerintah dan lembaga riset terkait, serta berbagai sumber berita dan artikel terkait keamanan dan pertahanan di kawasan Asia-Pasifik. Metode ini bertujuan untuk mendeskripsikan data secara detail mengenai kontribusi Indonesia dalam isu kawasan Indo-Pasifik melalui kebijakan *Global Maritime Fulcrum*. Pengumpulan data dilakukan melalui literature review atau studi pustaka. selanjutnya dilakukan analisis data untuk mengidentifikasi dan menganalisis tema-tema yang muncul dari data yang telah dikumpulkan. Analisis isi dilakukan dengan mengidentifikasi kata kunci, konsep, dan tema yang berkaitan dengan kontribusi Indonesia dalam isu kawasan Indo-Pasifik melalui kebijakan *Global Maritime Fulcrum*.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pemerintahan Indonesia di bawah kepemimpinan Jokowi memilih "Poros Maritim Dunia" atau "*Global Maritime Fulcrum*" (GMF) sebagai salah satu fokus utama dalam kebijakan luar negerinya karena beberapa faktor pendorong. Pertama, kebijakan ini mencerminkan semangat identitas maritim Indonesia yang telah ada sejak zaman kerajaan Sriwijaya dan Majapahit pada abad ke-14 dan ke-16. Armada yang kuat dari zaman tersebut digunakan untuk menaklukkan wilayah laut Indonesia, Thailand Selatan, dan Filipina. Kedua, Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dengan wilayah daratan seluas 1.826.440 kilometer persegi dan wilayah perairan seluas 2,8 juta kilometer persegi, termasuk 92.877 kilometer persegi perairan pedalaman dan 18.108 pulau. Indonesia juga memiliki zona ekonomi eksklusif (ZEE) seluas 7,9 juta kilometer persegi yang kaya akan sumber daya alam seperti kayu, minyak bumi, gas alam, timah, nikel, tembaga, batu bara, dan perikanan. Oleh karena itu, kebijakan GMF menjadi sangat signifikan untuk memanfaatkan potensi strategis dari sumber daya alam tersebut. (Cribb & Ford, 2009).

Kunci Implementasi Poros Maritim Dunia secara mendasar dalam mewujudkan Poros Maritim Dunia adalah untuk mendukung cita-cita Presiden dapat diwujudkan melalui konsep tol laut dalam lima tahun ke depan. Tol laut merupakan jalan tol enam jalur yang akan menghubungkan pelabuhan-pelabuhan di seluruh Indonesia. Melalui tol laut diharapkan masyarakat Indonesia di berbagai pelosok nusantara tidak lagi mengalami kelangkaan komoditas. Dalam implementasinya, program tol laut mulai tahun 2015 hingga Juni 2016, terdapat enam jalur tol laut dari barat hingga timur Indonesia, karena Pemerintah telah

menetapkan 24 pelabuhan sebagai Simpul Tautan Laut dengan dukungan 47 pelabuhan nonkomersial dan 41 pelabuhan sedang dibangun. (Aufiya, 2017).

Pentingnya kerja sama keamanan di Indo-Pasifik menjadi faktor yang dipertimbangkan oleh Indonesia dan aktor regional untuk memprediksi stabilitas kawasan dan sentralitas ASEAN. Kehadiran China di kawasan tersebut menjadi faktor penentu yang penting karena mempengaruhi penetapan norma Indo-Pasifik dan memainkan peran dalam pembentukan dialog militer/keamanan intra-regional yang melibatkan negara-negara ASEAN atau mitra dialognya. Kebijakan luar negeri China dan upaya ekonomi politiknya juga menarik perhatian terhadap kerja sama BRI, yang sering dianggap sebagai masalah utama dinamika geopolitik Indo-Pasifik. Selain faktor keamanan, banyak pertimbangan lain seperti konektivitas Indo-Pasifik dan kompetisi perdagangan terkait Indo-Pasifik, peran China yang berkembang, dan intervensi kekuatan utama juga menjadi perhatian. Indonesia, sebagai penggagas utama dan pemimpin *The ASEAN Outlook on Indo-Pacific* (AOIP), menjadi pusat perhatian kekuatan besar dan menengah di kawasan Indo-Pasifik karena keterkaitan antara realitas dan narasi visioner masing-masing AOIP.

Banyak diskusi yang berlangsung mengenai Indo-Pasifik, termasuk mengenai kebutuhan sepihak untuk menjalin hubungan bilateral, meningkatkan kontribusi dan politik regional secara substansial, serta menciptakan gerakan multilateral yang membentuk norma untuk memengaruhi proses regional dalam menetapkan kekuasaan. Sebelumnya, China telah memanfaatkan Indo-Pasifik sebagai jembatan untuk terhubung dengan mitra mereka di Afrika, koridor ekonomi Pakistan, dan untuk memastikan keamanan jalur perdagangan mereka yang bertanggung jawab atas sebagian besar impor China. (Brewster, 2017). Upaya untuk memperkuat keamanan komprehensif Indo-Pasifik telah dilakukan melalui penetapan norma regional dan pembangunan kelembagaan dari rezim, yang bertujuan untuk memberikan pandangan yang jelas tentang bagaimana menanggapi intervensi asing, sambil memperkuat interaksi dan mempromosikan lingkungan yang damai melalui pembangunan kepercayaan. Pentingnya negara kecil dan kekuatan menengah dalam arsitektur kawasan Indo-Pasifik juga telah dibahas dalam beberapa literatur, di mana kembali memperkuat kekuatan negara kecil akan menjadi hal yang paling penting dalam menciptakan lingkungan yang kooperatif bagi semua untuk bermain dan tinggal, serta memelihara perdamaian dan stabilitas di Indo-Pasifik.

Pada masa pemerintahan Yudhoyono, kebijakan luar negeri Indonesia yang dipimpin oleh Menteri Luar Negeri Hassan Wirajuda dan Marty Natalegawa difokuskan pada konstruksi geopolitik Asia-Pasifik. Meskipun hal ini tidak serta merta mengecualikan India dari ruang lingkup kebijakan luar negeri Indonesia, Natalegawa di bawah kepresidenan Yudhoyono lebih diarahkan untuk mempertahankan multilateralisme berbasis aturan melalui banyak lembaga sub-regional ASEAN seperti Forum Regional ASEAN dan EAS. Pada tahun 2013, Natalegawa juga mengusulkan prinsip-prinsip yang digariskan dalam Traktat Persahabatan dan Kerjasama, sebuah perjanjian utama tentang perilaku ASEAN sejak tahun 1976, diperluas ke EAS untuk mencerminkan 'pandangan Indo-Pasifik' (Natalegawa, 2017). Penafsiran modern terhadap prinsip-prinsip umum kebijakan luar negeri Indonesia dapat dipetik dari pidato Yudhoyono di Dewan Urusan Dunia Indonesia pada Mei 2005. Ia secara kritis menginterpretasikan prinsip-prinsip dasar kebijakan luar negeri Indonesia, "bebas dan aktif".

Dalam pidatonya, Yudhoyono menekankan perlunya 'pendekatan konstruktif' terhadap kebijakan luar negeri, yang dia gambarkan sebagai sarana untuk 'menggunakan kemerdekaan dan aktivisme kita untuk menjadi pembuat perdamaian, pembangun kepercayaan, pemecah masalah, dan menjembatani "pembangun". Yudhoyono kemudian menguraikan lima poin yang terdiri dari 'pendekatan konstruktif', yaitu: (1) pendekatan perdamaian hubungan internasional; (2) komitmen terhadap netralitas dan "postur strategis yang tidak mengancam";

(3) konektivitas sebagai “sumber pemberdayaan diplomasi”; (4) kebijakan luar negeri sebagai sarana untuk 'memproyeksikan identitas internasional Indonesia'; dan (5) “nasionalisme yang terbuka, moderat, toleran, dan berpandangan jauh ke depan” (Kementerian Luar Negeri Indonesia, 2005). Semua ini terekam dalam pepatah kebijakan luar negeri Yudhoyono “sejuta teman, nol musuh” dan pada dasarnya merupakan kebijakan luar negeri multilateralisme aktif, di mana Indonesia ingin berperan di dalam dan di luar ASEAN.

Dalam melaksanakan kebijakan luar negerinya, Presiden Yudhoyono membuat langkah signifikan dalam meningkatkan profil internasional Indonesia, berusaha menjadikan Indonesia sebagai panutan bagi negara-negara demokrasi lainnya, sementara pada saat yang sama, mempertahankan keterlibatan regional Indonesia dan tetap netral dalam politik kekuatan besar (Fitriani, 2015). “*Global Maritime Fulcrum*” (GMF), yang awalnya diperkenalkan oleh Jokowi selama kampanye kepresidenannya tahun 2014, menggabungkan persepsi istimewanya tentang peran maritim Indonesia, yaitu desakannya untuk menghidupkan kembali identitas maritim Indonesia (Agastia, 2016).

Indonesia, sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, memiliki peran penting dalam isu kawasan Indo-Pacific. *Global Maritime Fulcrum* (GMF) adalah kebijakan strategis yang diluncurkan oleh Presiden Indonesia, Joko Widodo, pada tahun 2014. Sejak awal menjabat pada tahun 2014, Presiden Widodo dan tim kebijakan luar negerinya telah memiliki perhitungan nyata tentang bagaimana mengamankan kepentingan strategis Indonesia di tengah meningkatnya ketegangan di antara kekuatan besar di kawasan Indo-Pasifik. Dengan demikian, sejak awal disadari bahwa Indonesia tidak bisa tinggal diam atau acuh terhadap persaingan ambisi kekuatan-kekuatan besar untuk menguasai kawasan. Rangkaian peristiwa strategis berikut memberikan bukti yang jelas dan signifikan bahwa kekuatan-kekuatan besar dengan kepentingan strategisnya di Samudera Pasifik dan Samudera Hindia mempromosikan aspirasi geopolitik dan geoekonomi masing-masing sehingga tidak lagi relevan untuk membicarakan dua samudera sebagai ruang yang terpisah. atau entitas kebijakan geografis.

Pertama, komponen maritim dari *Belt and Road Initiative* (BRI) China memerlukan hubungan maritim langsung antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia di mana China ingin membangun jaringan “koordinasi kebijakan, konektivitas fasilitas, perdagangan tanpa hambatan, integrasi keuangan, dan orang-orang untuk ikatan rakyat” (Dewan Negara Republik Rakyat Tiongkok, 2015). Mulai dari wilayah pesisir Tenggara China hingga ke Laut China Selatan melalui Selat Malaka terus ke Samudera Hindia sebelum mencapai Afrika dan akhirnya Eropa. Negara-negara yang berpartisipasi dalam koridor maritim yang luas ini dapat memperoleh keuntungan dari arus bebas komoditas perdagangan, barang dan jasa industri, modal, sumber daya manusia, dan teknologi karena ekonomi mereka menjadi semakin saling bergantung di bawah koordinasi China sebagai pemrakarsa dan pendiri multilateralisme jenis baru. Fakta bahwa koridor maritim seperti itu melintasi Samudra Pasifik dan Hindia mengharuskan pembentukan ruang geografis politik di mana kerangka kebijakan yang sesuai dapat diusulkan untuk membuatnya berfungsi seperti yang diinginkan China.

Dengan demikian, tanggapan kooperatif negara-negara di Asia Tenggara dan Asia Selatan tampaknya menjadi keharusan bagi China agar proyek konektivitas maritimnya dapat mencapai tujuan yang dimaksudkan. Kedua, kekuatan besar selalu peka terhadap kemungkinan perubahan konfigurasi kekuatan dalam sistem internasional. Kebangkitan ekonomi dan militer China yang tersirat dalam BRI-nya khususnya komponen maritim telah memicu reaksi dari AS, Jepang, Australia, dan India yang menghidupkan kembali gagasan *Quadrilateral Security Dialogue* (QSD) di sela-sela KTT Asia Timur November 2017 (EAS) di Manila.

Tujuan dari kebijakan ini adalah memperkuat posisi Indonesia sebagai poros maritim global melalui pengembangan ekonomi maritim dan keamanan maritim. Kontribusi Indonesia

dalam Isu Kawasan Indo-Pacific melalui GMF sangat penting, terutama dalam tiga aspek utama: pertama, keamanan maritim; kedua, perdagangan dan investasi maritim; dan ketiga, kerjasama regional dalam kawasan Indo-Pacific. Dalam hal keamanan maritim, Indonesia telah memainkan peran penting dalam menjaga stabilitas di kawasan Indo-Pasifik. Sebagai negara maritim terbesar di kawasan, Indonesia memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga keamanan di perairan dan pulau-pulau yang dimilikinya. Untuk itu, Indonesia telah meningkatkan kapasitasnya dalam bidang pertahanan dan keamanan maritim dengan mengembangkan kekuatan angkatan lautnya dan memperkuat kerjasama dengan negara-negara lain dalam kawasan. Selain itu, Indonesia juga telah aktif mempromosikan kerjasama regional untuk meningkatkan keamanan maritim di kawasan Indo-Pasifik. Misalnya, melalui kerjasama ASEAN, Indonesia memainkan peran penting dalam membentuk *Code of Conduct* (COC) untuk menyelesaikan sengketa di Laut China Selatan.

Tanggapan Indonesia terhadap ancaman Laut Cina Selatan terdiri dari setidaknya dua elemen: diplomasi berbasis domestik yang lebih aktif dan pragmatis dan pendekatan keamanan yang lebih asertif terhadap integritas teritorial. Diplomasi Aktif yang dilakukan Indonesia dalam menanggapi permasalahan ini dikarenakan meningkatnya ketegangan dan prospek instabilitas di Laut China Selatan, diplomasi Indonesia pada masa pemerintahan Jokowi secara umum bersifat proaktif. Aktivisme diplomasi Indonesia baru-baru ini dibangun di atas pencapaian pemerintahan sebelumnya di bawah Presiden Yudhoyono, terutama dalam hal penetapan norma dan penegasan kepemimpinan regional Indonesia di tengah meningkatnya tantangan keamanan di kawasan.

Mengingat kurangnya minat Jokowi dalam urusan luar negeri, konseptualisasi dan implementasi diplomasi Indonesia diserahkan terutama kepada para penasihat dan menteri, termasuk Menteri Retno Marsudi dan pejabat senior yang berpengalaman di Kementerian Luar Negeri. Namun, substansi diplomasi Indonesia sebagian didorong oleh seperangkat agenda domestik yang lebih disukai oleh presiden dalam hal substansi sebenarnya. Bagi Indonesia, sebagai negara kepulauan, aturan dan hukum internal, khususnya UNCLOS, memiliki kepentingan strategis. Bagaimanapun, UNCLOS, dan ratifikasinya oleh negara lain, merupakan tulang punggung pengakuan internasional atas integritas wilayah Indonesia. Jadi, dalam hal diplomasi multilateral di Laut Cina Selatan, promosi dan penghormatan terhadap UNCLOS telah menjadi tema umum. Misalnya, dalam negosiasi COC, Indonesia mengusulkan untuk memasukkan ketentuan yang mewajibkan semua pihak "untuk menghormati Zona Ekonomi Eksklusif dan landas kontinen negara pantai sebagaimana diatur dalam UNCLOS 1982" (Thayer, 2018).

Dalam usaha menempatkan dirinya dalam struktur Indo-Pasifik, Indonesia dengan aktif mempromosikan peran sebagai "pemimpin regional" dan "pembangun jembatan" yang lebih menonjol sesuai dengan konsepsi perannya sendiri. Upaya ini tercermin dari promosi Indonesia terhadap gagasan Indo-Pasifik yang inklusif dan mengakomodasi semua pihak, bukan hanya mengisolasi satu aktor tertentu. Selain itu, Indonesia memilih untuk menggunakan ASEAN sebagai wadah Untuk memperjuangkan pandangan-nya terhadap Indo-Pasifik, sehingga menunjukkan bahwa Indonesia siap untuk memenuhi harapan struktural atas perilaku yang sesuai dengan peran "*middle power*" atau "kekuatan menengah" melalui kepemimpinan regional.

Middle power merupakan aktor yang dapat mempengaruhi kebijakan regional atau global melalui agenda mereka sendiri, meskipun memiliki kekuatan yang terbatas dibandingkan dengan kekuatan besar. Menurut Öniş & Kutlay, *middle power* dapat dibagi menjadi dua kelompok yaitu *emerging* dan *established*. *Established middle power* dianggap sebagai katalis untuk mempromosikan liberal international order, sementara *emerging middle power*

memiliki ruang gerak yang lebih terbatas karena kurangnya pengalaman dan posisi mereka dalam hirarki struktur global. Emerging middle power menghadapi dilema dari existing International order yang didominasi oleh kekuatan barat dan perlu melakukan identifikasi mengenai tantangan yang dihadapinya. Öniş & Kutlay mengidentifikasi keterbatasan-keterbatasan yang dihadapi emerging middle power pada tatanan regional dan global, seperti kemampuan menjadi role model, kapasitas membangun koalisi, kapasitas tata kelola dan kemampuan menjaga ekspektasi, serta identifikasi niche area. Dengan melakukan identifikasi tantangan dan keterbatasan yang dihadapi, emerging middle power dapat memaksimalkan peran secara optimal dalam mempengaruhi kebijakan regional atau global melalui agenda yang dimiliki.

Selain itu, Indonesia juga aktif terlibat dalam kerjasama keamanan maritim dengan negara-negara lain seperti Australia, India, Jepang, dan Amerika Serikat. Kedua, dalam hal perdagangan dan investasi maritim, Indonesia telah memperkuat posisinya sebagai poros maritim global melalui GMF. Dalam upaya meningkatkan ekonomi maritimnya, Indonesia telah melakukan investasi besar-besaran di sektor kelautan dan perikanan. Selain itu, Indonesia juga telah meningkatkan kerjasama dengan negara-negara lain dalam hal perdagangan dan investasi maritim. Ketiga, Indonesia juga telah aktif mempromosikan kerjasama regional dalam kawasan Indo-Pacific. Sebagai anggota ASEAN dan G20, Indonesia telah memainkan peran penting dalam membentuk kerjasama regional dan global. Indonesia juga telah mengambil inisiatif dalam hal kerjasama maritim di kawasan Indo-Pacific. Misalnya, melalui GMF, Indonesia telah memperkuat kerjasama maritim dengan negara-negara lain dalam hal pengembangan infrastruktur maritim, kerjasama ekonomi, dan keamanan maritim.

Dalam rangka meningkatkan kontribusinya dalam isu kawasan Indo-Pacific, Indonesia terus melakukan upaya untuk memperkuat GMF. Beberapa langkah yang diambil antara lain mengembangkan infrastruktur maritim, meningkatkan kapasitas keamanan maritim, memperkuat kerjasama dengan negara-negara lain dalam kawasan Indo-Pacific, dan memperkuat diplomasi maritim. Namun, masih ada beberapa tantangan yang harus dihadapi oleh Indonesia dalam mengimplementasikan GMF dan memperkuat kontribusinya dalam isu kawasan Indo-Pacific. Salah satunya adalah sengketa maritim di kawasan Indo-Pacific, terutama di Laut China Selatan. Indonesia perlu terus mempromosikan dialog dan negosiasi untuk menyelesaikan sengketa tersebut agar kawasan Indo-Pacific dapat terus menjadi kawasan yang aman dan stabil.

Selain itu, Indonesia juga meningkatkan kapasitasnya dalam hal teknologi maritim dan sumber daya manusia. Dalam era digital dan teknologi yang semakin berkembang, Indonesia perlu memperkuat kemampuannya dalam menghadapi tantangan baru di bidang maritim. Dalam rangka memperkuat kontribusinya dalam isu kawasan Indo-Pasifik, Indonesia juga perlu terus mempromosikan kerjasama regional dan global, baik di bidang keamanan maritim, perdagangan dan investasi maritim, maupun dalam pengembangan infrastruktur maritim. Melalui GMF, Indonesia dapat memperkuat perannya sebagai poros maritim global dan memainkan peran penting dalam menjaga stabilitas dan kemakmuran di kawasan Indo-Pasifik.

Presiden Widodo telah membawa cara untuk menghubungkan prioritas kebijakan dalam negerinya dan kebijakan luar negeri Indonesia terhadap kawasan Indo-Pasifik. Pertama, tidak diragukan lagi bahwa pembentukan kawasan Indo-Pasifik melalui dinamika politik internasional di antara kekuatan-kekuatan besar telah merangsang tanggapan dari negara-negara yang kepentingan strategisnya dipengaruhi oleh wacana kebijakan tersebut. Di bawah Presiden Widodo, Indonesia telah memiliki strategi besar untuk menggambarkan dirinya sebagai poros maritim global yang sejalan dengan sifat kepulauan negara dan niat untuk berkontribusi pada stabilitas dan keamanan kawasan Indo-Pasifik. Presiden Jokowi menyadari

bahwa secara geografis Samudera Pasifik dan Samudera Hindia terhubung melalui perairan teritorial Indonesia dan tentunya Indonesia merasakan tekanan untuk mencari cara bagaimana mengamankan kedaulatan maritimnya dari segala potensi ancaman eksternal.

Dengan demikian, deklarasi diri Indonesia sebagai poros maritim dunia memiliki dua tujuan yang saling berkaitan. Di tingkat eksternal, penegasan Indonesia sebagai poros maritim dunia merupakan langkah awal menuju pengumuman rencana selanjutnya untuk memulai kerja-sama Indo-Pasifik. Dari sisi domestik, Indonesia ingin memperkuat klaimnya sebagai kekuatan maritim dengan membangun konektivitas antar pulau demi interaksi komersial yang lebih efisien dan kegiatan ekonomi lainnya. Kombinasi infrastruktur maritim yang baik dan modernisasi angkatan laut Indonesia diharapkan pada akhirnya memperkuat kedaulatan maritim Indonesia dan kapasitas untuk mengelola sumber daya maritim dengan mobilisasi sumber daya asing melalui kerja sama yang telah diputuskan untuk dirintis oleh Indonesia. Kedua, posisi unik Indonesia tanpa konflik signifikan dengan kekuatan besar mana pun memungkinkannya untuk memperkuat hubungan dengan mereka semua tanpa mengorbankan kredibilitasnya sebagai penyedia layanan mediasi ketika keadaan menuntut peran tersebut.

Melalui posisi unik yang didapatkan, Indonesia memiliki fleksibilitas untuk menjangkau untuk membangun hubungan strategis dengan mereka sekaligus mengundang mereka untuk memasok sumber daya keuangan yang dibutuhkan untuk pembangunan infrastrukturnya. Saat ini Indonesia bekerja sama dengan China untuk membangun kereta cepat Jakarta – Bandung sambil mengajak Jepang untuk mendukung pembangunan deep seaport di Patimban di sebelah timur Tanjung Priok. Dalam sebuah langkah yang tampaknya untuk menyeimbangkan dominasi maritim China dari Laut China Selatan hingga Samudra Hindia melalui Selat Malaka, India telah menawarkan proyek pembangunan pelabuhan Sabang ke India yang Kebijakan Bertindak Timur saat ini membutuhkan keterlibatan intensif dengan negara-negara anggota ASEAN. Pencarian multi-arah Indonesia untuk investasi asing di kawasan Indo-Pasifik untuk pembiayaan proyek-proyek infrastrukturnya ternyata sejalan dengan inisiatifnya untuk menciptakan arsitektur diplomasi yang kooperatif dan damai dalam kerangka ASEAN *Outlook on the Indo- Pasifik*. Ini juga merupakan indikasi bahwa Presiden Joko Widodo memaknai prinsip politik luar negeri bebas aktif dengan sangat pragmatis. Ketiga, masuk akal untuk mengatakan bahwa hubungan bilateral antara India dan Indonesia merupakan elemen penting dari keseluruhan pembangunan arsitektur kawasan Indo-Pasifik yang baru.

Inisiatif Indonesia untuk mempromosikan kerja sama Indo-Pasifik memiliki ciri khas yang menggarisbawahi pentingnya perdamaian internasional, stabilitas kawasan, dan kemakmuran bersama. Rangkaian peristiwa sebelum pengumuman inisiatif tersebut dapat secara kuat menunjukkan bahwa Indonesia sedang bergerak untuk memperluas arena diplomasi di mana integritas prinsip-prinsip UNCLOS dapat dipertahankan tidak hanya demi kedaulatan maritim Indonesia sendiri tetapi juga keharusan sebuah negara. tekanan yang lebih besar untuk mencegah China melanggar hukum internasional lebih lanjut setelah membangun infrastruktur militer di pulau-pulau yang disengketakan di Laut China Selatan. Dengan semakin sulitnya menyatukan berbagai kebijakan anggota ASEAN yang berbeda dan bertentangan dalam menangani sengketa teritorial di Laut China Selatan dan kecenderungan China untuk menginstrumentasikan ketergantungan ekonomi mereka pada investasi dan akses pasar China, Indonesia berada di bawah tekanan yang meningkat untuk mencari alternatif selain kekuatannya sendiri. ketergantungan tradisional pada keputusan kolektif yang dihasilkan dalam KTT ASEAN. Selain itu, negara-negara ASEAN dikatakan kurang mengubah komitmen kolektif mereka menjadi tindakan atau proyek nyata untuk menyelesaikan masalah bersama (Agastia, 2021).

Di bawah Presiden Widodo, Indonesia menyadari bahwa harus ada mekanisme diplomasi untuk mengubah narasi perimbangan kekuatan yang lebih disukai oleh negara-negara besar menjadi apa yang disebut oleh mantan Menteri Luar Negeri Indonesia Marty Natalegawa sebagai “keseimbangan dinamis”. Dengan sendirinya, ASEAN tidak dapat membujuk China untuk mengadopsi narasi kebijakan seperti itu karena membutuhkan mekanisme yang lebih luas seperti *East Asia Summit (EAS)* dan *Treaty of Amity and Cooperation (TAC)* yang cukup kuat sebagai platform bersama untuk merumuskan keputusan yang dapat diterima oleh semua kekuatan besar, termasuk Cina. Hal inilah yang menjadi pemikiran Indonesia dalam upaya mempertahankan sentralitas ASEAN dalam kerangka kerja sama Indo-Pasifik. Tidak ada keraguan bahwa China akan memberikan prioritas tertinggi pada penerapan konektivitas maritim BRI-nya. Terlepas dari preferensi China yang jelas untuk keberhasilan BRI-nya, Beijing tidak dapat dengan mudah mengorbankan hubungan strategisnya dengan ASEAN, jika tidak maka akan berisiko kehilangan legitimasinya di Asia. Menteri Pertahanan AS James Mattis melontarkan kritik keras terhadap “intimidasi dan pemaksaan” China di Laut China Selatan selama Dialog Shangri-la ke-17 di Singapura (Anjaiah, 2018).

Menanggapi hal tersebut, Hangtian, juru bicara Kedutaan Besar China di Jakarta menulis surat kepada editor *The Jakarta Post* yang mengeluhkan bahwa AS hanya membuat “sensasionalisasi” di Laut China Selatan sementara pada saat yang sama menunjukkan penekanan kuat Beijing pada soliditas hubungan bilateral. Hubungan Tiongkok dengan negara-negara anggota ASEAN (Anjaiah, 2018). Terlihat jelas bahwa di satu sisi China ingin merangkul ASEAN sebagai mitra dialog kooperatifnya dalam menangani sengketa teritorial di Laut China Selatan, dan di sisi lain menolak campur tangan dari luar terutama oleh AS. Ambiguitas China dalam menghadapi negara-negara ASEAN dapat diperumit oleh fakta bahwa di bawah Presiden Xi Jinping, China cenderung cukup tegas dalam kebijakan keamanannya terutama terkait sengketa teritorial di Laut China Selatan (Sinaga, 2020). Dalam menafsirkan makna kepemimpinan regional Indonesia di ASEAN, Presiden Widodo tidak pernah mengesampingkan fakta bahwa Indonesia bersaing dengan negara-negara ASEAN lainnya terutama dalam memaksimalkan peluang ekonomi yang datang seiring dengan kebangkitan China. Selain itu, dalam mengakhiri masa jabatan keduanya pada tahun 2024,

Presiden memastikan legitimasi kinerjanya terjamin melalui pemulihan ekonomi yang lancar dan terciptanya stabilitas kawasan. Memperluas dan memperdalam kerja sama bilateral saat ini dengan China dalam perdagangan dan investasi tampaknya menjadi suatu keharusan. Alhasil, apapun kebijakan yang akan diambil Indonesia dalam menghadapi kontestasi kekuatan besar di kawasan Indo-Pasifik, akan ditempuh dengan cara pragmatis agar tidak berisiko merusak momentum kerja sama bilateral dengan China. Masih harus dilihat seberapa jauh pragmatisme tersebut akan mempengaruhi prinsip kebijakan luar negeri Indonesia yang independen dan aktif karena terlalu dekat dengan China akan memicu reaksi domestik dari kelompok nasionalis dan partai oposisi di parlemen.

Tampaknya terlalu dini untuk mengatakan dengan pasti bagaimana Indonesia akan menindaklanjuti penerimaan *ASEAN Outlook on the Indo-Pacific*. Indonesia tidak hanya menggunakan diplomasi negara ke negara tetapi juga platform regional ASEAN untuk mendapatkan dukungan dari semua pemangku kepentingan termasuk kekuatan besar. Penggunaan mekanisme ASEAN yang ada secara optimal mungkin merupakan cara terbaik untuk mengumpulkan semua kekuatan besar, di mana mereka dapat memiliki platform bersama untuk melakukan dialog daripada mengejar politik kekuatan dengan efek destabilisasi. Negara-negara adidaya terus membingkai kebijakan strategisnya berdasarkan aspirasi geopolitik masing-masing terkait kemunculan kawasan Indo Pasifik. Oleh karena itu tampaknya efek diskursif dari dinamika regional baik pada level kebijakan maupun komunitas

epistemik tidak dapat dikesampingkan karena pertaruhannya nyata, dan konsekuensi politiknya jelas dikenali. Masih harus dilihat bagaimana Indonesia akan mengarahkan kepemimpinan internasionalnya dalam mempromosikan kerja sama

IndoPasifik meskipun terdapat peluang untuk memulai diskusi dan dialog berdasarkan kepentingan bersama dari semua pemangku kepentingan. Dalam konteks ini, strategi inovasi baru dalam pelaksanaan diplomasi ekonomi Indonesia dapat membantu dengan mengkalibrasi ulang potensi besar Indonesia dalam ekonomi digital yang berkembang pesat di kawasan ini (Margiansyah, 2020).

KESIMPULAN

Dalam upaya untuk memposisikan dirinya dalam konteks Indo-Pasifik, Indonesia sedang giat mempromosikan peran sebagai "pemimpin regional" dan "pembangun jembatan" yang lebih mencolok, sejalan dengan konsepsi dirinya sendiri. Langkah ini terlihat melalui upaya Indonesia dalam memperkenalkan konsep Indo-Pasifik yang inklusif dan menerima semua pihak, tanpa mengisolasi satu aktor tertentu. Selain itu, Indonesia memilih untuk menggunakan ASEAN sebagai platform untuk memajukan visinya mengenai Indo-Pasifik, yang menunjukkan bahwa Indonesia siap untuk memenuhi harapan struktural sebagai "kekuatan menengah" melalui kepemimpinan regional dan perilaku yang tepat. Indonesia juga terlibat aktif dalam kerjasama keamanan maritim dengan negara-negara seperti Australia, India, Jepang, dan Amerika Serikat. Selain itu, Indonesia telah memperkuat posisinya sebagai poros maritim global melalui GMF dalam hal perdagangan dan investasi maritim. Dalam upaya untuk meningkatkan ekonomi maritimnya, Indonesia telah menginvestasikan dana besar di sektor kelautan dan perikanan serta meningkatkan kerjasama dengan negara-negara lain dalam hal perdagangan dan investasi maritim. Indonesia juga secara aktif mempromosikan kerjasama regional dalam kawasan Indo-Pacific sebagai anggota ASEAN dan G20, dan memainkan peran penting dalam membentuk kerjasama regional dan global. Indonesia telah mengambil inisiatif dalam hal kerjasama maritim di kawasan Indo-Pacific, contohnya melalui GMF, dengan memperkuat kerjasama maritim dengan negara-negara lain dalam hal pengembangan infrastruktur maritim, kerjasama ekonomi, dan keamanan maritim.

DAFTAR PUSTAKA

- Agastia, I.G.B.D. (2020). Understanding Indonesia's role in the 'ASEAN Outlook on the Indo-Pacific': A role theory approach. *Asia Pacific Policy Study*;7:293–305.
- Arif, M . 2021. Balancing with Jokowi's Characteristics: A Neoclassical Realism Approach to Indonesia's Foreign and Security Policies in the South China Sea. *Journal of Asian Security and International Affairs*. <https://doi.org/10.1177/23477970211041455>
- Aristama, Ferga. (2022). Emerging Middle Power and Challenges on Realizing Vision of Indonesia 2045 in Asia Pacific: Systematic Review. *Politica* Vol. 13 No. 2/ DOI 10.22212/jp.v13i2.3427
- Aufiya, M.A. 2017. Indonesia's Global Maritime Fulcrum: Contribution in the Indo-Pacific Region. *Andalas Journal of International Studies* Vol 6 No 2. <https://doi.org/10.25077/ajis.6.2.143-158.2017>
- Brewster, D. (2017). Silk Roads and Strings of Pearls: The Strategic Geography of China's New Pathways in the Indian Ocean. *Geopolitics*, 22(2), 269- 291. <https://doi.org/10.1080/14650045.2016.1223631>
- Creswell, John W. 2003. *Research Design. Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. Sage Publication.
- Cribb, Robert and Michele Ford (eds). (2009). *Indonesia Beyond the Waters' Edge: Managing*

- an Archipelagic State. Singapore Journal of Tropical Geography 32(1):115 - 116.
DOI:[10.1111/j.1467-9493.2011.00418.1.x](https://doi.org/10.1111/j.1467-9493.2011.00418.1.x)
- Fitriani, E. (2015). Yudhoyono's foreign policy: Is Indonesia a rising power? In E. Aspinall, M. Mietzner, & D. Tomsa (Eds.), *The Yudhoyono presidency: Indonesia's decade of stability and stagnation*. Singapore: ISEAS <https://doi.org/10.1002/app5.308>
- Jemadu, Aleksius dan Lantang, F. (2021). Contested Interpretations Of Indonesia's International Leadership In The Foreign Policy Of President Susilo Bambang Yudhoyono And Joko Widodo. *Journal of ASEAN Studies*, Vol. 9, No. 2, pp. 199-217.
<https://doi.org/10.21512/jas.v9i2.7478>
- Jose H.S dan Prasetyo S.A. (2021). A Strategic View Of Minilateralism: Indonesia, Quad, Asean, South Korea, Japan, And Impediment To Asean Centrality? *Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian*. Vol. 4 No. 2. <https://doi.org/10.52617/jikk.v5i2.268>
- Öniş, Ziya, dan Mustafa Kutlay. (2017). "The dynamics of emerging middle-power influence in regional and global governance: the paradoxical case of Turkey." *Australian Journal of International Affairs* 71, no. 2 : 164-183.
<https://doi.org/10.1080/10357718.2016.1183586>
- Sartono, dkk. *Perimbangan Kekuatan Laut Indonesia Masa Kini dihadapkan dengan Geopolitik Kawasan Asia Pasifik*. *Jurnal Strategi Pertahanan Laut*:
- Till, Geoffrey. (2015). Indonesia as a growing maritime power: possible implications for Australia, *Sea Power Centre*, Issue No. 4. <https://navalinstitute.com.au/wp-content/uploads/2015/06/soundings4.pdf>
- Universitas Pertahanan Indonesia. Diunduh pada
<https://jurnalprodi.idu.ac.id/index.php/SPL/article/view/645>